

SKRIPSI
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI
TAHUN 2015 DI KABUPATEN BARRU
(STUDI KASUS TERPILIHNYA KEMBALI TERSANGKA KORUPSI ANDI
IDRIS SYUKUR SEBAGAI BUPATI TAHUN 2015-2020)



DISUSUN
OLEH
MULIANI
E111 16 508

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023

HALAMAN JUDUL

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI
TAHUN 2015 DI KABUPATEN BARRU
(STUDI KASUS TERPILIHNYA KEMBALI TERSANGKA KORUPSI ANDI
IDRIS SYUKUR SEBAGAI BUPATI TAHUN 2015-2020)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

OLEH

MULIANI

E111 16 508

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI TAHU 2015 DI
KABUPATEN BARRU**

**(STUDI KASUS TERPILIHNYA KEMBALI TERSANGKA KORUPSI ANDI IDRIS
SYUKUR SEBAGAI BUPATI TAHUN 2015-2020)**

Di susun oleh :

MULIANI

E11116508

Dinyatakan memenuhi syarat dan siap diperhadapkan dengan tim penguji

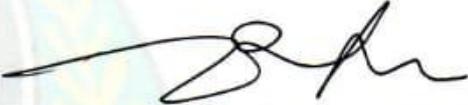
Pada tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. A. Yakub, M.Si., P.hD
NIP. 19621231 199003 1023


Andi Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP. 19731122 200212 1001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. P. hD
NIP. 19621231 199003 1023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2015 DI
KABUPATEN BARRU (STUDI KASUS TERPILIHNYA KEMBALI TERSANGKA
KORUPSI ANDI IDRIS SYUKUR SEBAGAI BUPATI TAHUN 2015-2020)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MULIANI

E11116508

**Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Politik**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. A. Yakub M.Si., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Haryanto, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliani

NIM : E11116508

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 Di Kabupaten Barru (Studi Kasus Terpilihnya Kembali Tersangka Korupsi Andi Idris Syukur Sebagai Bupati Tahun 2015-2020)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2023



MULIANI

ABSTRAK

Muliani. NIM E11116508. Perilaku memilih Masyarakat pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 Kabupaten Barru (Studi Kasus Terpilihnya kembali tersangka Korupsi Andi Idris Syukursebagai Bupati Tahun 2015-2020). Dibimbing oleh Pembimbing Utama bapak **Andi Yakub** dan Pembimbing Pendamping bapak **Andi Naharuddin**.

Pilkada merupakan kontestasi politik di tingkat kabupaten yang dilakukan 5 tahun sekali, dalam proses pilkada tugas utama calon bupati dan wakil bupati untuk mengambil simpati masyarakat untuk menyakinkan dirinya untuk dipilih. Permasalahan pilkada di kabupaten Barru yaitu terkait adanya calon yang menjadi tersangka kasus korupsi yang dimana dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang perilaku memilih masyarakat Kabupaten Barru dalam menentukan pilihan politiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi perilaku memilih di kabupaten Barru dalam menentukan pilihan politiknya dalam pilkada kabupaten barru. Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif yang dimana dilakukan wawancara mendalam kepada informan yang dianggap sesuai dengan penelitian ini guna menjadi gambaran dalam penulisan hasil penelitian ini dan kemudian diolah dengan menggunakan perbandingan teori dan beberapa pendekatan guna menghasilkan tulisan yang ilmiah. Untuk menjelaskan hasil penelitian ini, penulis menggunakan teori perilaku memilih serta pendekatan konsep secara sosiologis, psikologis, serta pendekatan memilih rasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku memilih dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap partai politik, sikap terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilihan umum dan sikap terhadap isu-isu yang berkembang sebelum pelaksanaan pemilu. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dimana pertimbangan tidak hanya tentang "ongkos". Pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Kata kunci : *Perilaku Memilih, Partai politik, Pilkada, korupsi.*

ABSTRACT

Muliani. NIM E11116508. Community voting behavior in the 2015 Regent Election of Barru Regency (Case Study of the Re-election of Corruption suspect Andi Idris Syukurs as Regent 2015-2020). Guided by the Main Supervisor, **Mr. Andi Yakub** and the Co-Supervisor, **Mr. Andi Naharuddin**.

Pilkada is a political contestation at the regency level that is carried out every 5 years, in the election process the main task of the regent and deputy regent candidates is to gain public sympathy to convince themselves to be elected. The problem of elections in Barru district is related to the existence of candidates who are suspects in corruption cases, which in this study will explain the voter behavior of the Barru Regency community in determining their political choices.

This research aims to find out the contours of voter behavior in Barru district in determining their political choices in the Barru district election. Data collection was carried out using a qualitative method in which in-depth interviews were conducted with informants deemed appropriate to this research in order to illustrate the results of this research and then processed using theoretical comparisons and several approaches to produce scientific writing. To explain the results of this research, the author uses the theory of voter behavior as well as social, psychological, and rational voter approaches.

The results of this study indicate voter behavior is influenced by a person's attitude towards political parties, attitudes towards candidates nominated in general elections and attitudes towards issues that develop before the implementation of elections. The rational choice approach sees voting activities as a product of profit and loss calculations, where considerations are not only about "costs". Profit and loss considerations are used to make decisions about the party or candidate chosen, especially to make a decision whether to vote or not to vote.

Keywords: *Voter behavior, political parties, elections, corruption.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang hingga saat ini masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul; "Perilaku memilihmasyarakat pada pemilihan Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Barru (Studi kasus Terpilihnya Tersangka Korupsi Andi Idris Syukur sebagai Bupati Tahun 2015-2020)"

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir serta memperluas wawasan. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis ucapkan kepada keluarga besar terkhususnya untuk Bapak Burhanuddin dan (Alm) Ibu Rahma yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, beserta saudari perempuan saya Astri Dwiyanti dan saudara lelaki saya Muhammad Teguh Anugrah yang saya cintai.

Dan Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si., P.hD** selaku pembimbing utama serta pendamping akademik bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si** selaku

pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan dengan penuh ikhlas dan kesabaran, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Phil Sukri, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya.
3. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan staff Departemen Ilmu Politik, **(Alm.) Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA; Prof. Dr. Armin, M.Si; Prof Muhammada M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; A. Naharuddin S.IP, M.Si; Dr. Phil Sukri, M.Si, Ph.D; A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, MA; (Alm.) Prof Basir Syam, M.Ag; Imran, S.IP, M.Si; Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP, MA dan Zulhajar, S.IP, M.Si.**

5. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik.
6. Kepada seluruh informan penulis yang memberikan respon yang baik terhadap Penelitian saya.
7. Kepada Nenek, Tante Sarma, Adik Sepupu Adelia yang jauh di Sebatik sana, Tante Nammi, Tante Syamsia, Om Undding, Om Ilman, Om Ullah, dan Om Ardan yang selalu mengingatkan serta mensupport secara moril dan materil dalam dunia perkuliahan ini.
8. Kepada Reformasi 2016 yang selalu memberikan support dalam hal apapun dari awal saya masuk kuliah hingga saat ini.
9. Kepada seseorang lelaki yang tiada henti menemani segala proses, selalu memberikan motivasi, nasehat, kasih sayang dan cintanya kepada saya.
10. Kepada teman-teman Ilmu Politik 2016 terima kasih atas kerja sama, bantuan dan dukungan selama menempuh perkuliahan.
11. Kepada Himapol FISIP Unhas dan BEM KEMA FISIP Unhas yang menjadi wadah pengembangan diri sehingga saya seperti sekarang.
12. Kepada Kakanda HIMAPOL yang banyak memberikan Ilmu bertahan hidup di Kampus.
13. Kepada saudara saudariku REFORMASI16, terkhusus Widya, Arin, Anggun, Alfa, Caca, Eki, Nurul, Agung, Marie, Gazali, Anwar, Bias, Tommy, Wawan, Iwan
14. Kepada Mace – Mace SOSPOL yang bersedia memberikan asupan Gizi saya selama Di Kampus.

15. Kepada Adik-Adik di Himapol yang selalu menghibur selama di Kampus, Dekrit 2017, Revolusi 2018.
16. Kepada teman-teman KKN LAPPA GELOMBANG 102 yang masih lumayan hangat sampai saat ini apalagi jika ada gosip terbaru.
17. Kepada Kanda Fikri yang selalu membantu penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini.
18. Kepada kakak-kakak pengurus BUMDes Desa Nepo yang telah memberikan izin kerja untuk segera menyelesaikan studi saya.
19. Kepada kakak-kakak dan teman-teman panitia KEMAH NASIONAL LITERASI yang selalu support untuk menyelesaikan studi saya.
20. Kepada kakanda Robby yang tak pernah lupa untuk mensupport, membimbing dan berbagi ilmu selama masa studi ini.

Serta kepada seluruh teman-teman yang penulis belum sempat tuliskan satu per satu. Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan di dalamnya.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Maret 2023

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Akademis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Perilaku Memilih (Voting Behavior)	5
2.2 Pendekatan Perilaku Memilih	8
2.2.1 Pendekatan Sosiologis.....	9
2.2.2 Pendekatan Psikologis.....	11
2.4 Model Perilaku Politik	15
2.5 Pemilihan Umum Kepala Daerah	17
2.6 Kerangka Pemikiran.....	20
2.7 Skema Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian	22
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	23
3.3 Jenis Data.....	23
3.4 Pengumpulan Data	23
3.5 Informan Penelitian.....	25

3.6	Analisa Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		27
4.1	Sejarah Kabupaten Barru	27
4.2	Kerajaan Barru Pada Masa Penjajahan dan Pada Masa Kemerdekaan RI ..	32
4.3	Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2015-2020.....	39
4.3.1	Perspektif Hukum.....	40
4.3.2	Perspektif Politik	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
5.1	Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Barru	55
BAB VI PENUTUP		64
6.1	Kesimpulan.....	64
6.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66
LAMPIRAN – LAMPIRAN		68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi dimana pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Semua proses pembuatan kebijakan politik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasari pada kedaulatan rakyat. Di Indonesia pemilihan bupati merupakan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan bupati diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi.

Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya adalah dengan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi merupakan suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Dimana pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara yang demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengkokohkan dirinya sebagai negara demokratis, dan menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota legislatif di pemerintahan atau kepala daerah/wakil kepala daerah.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui perilaku pemilih,

dimana perilaku memilih sangat diperlukan dalam setiap pemilihan Bupati yang merupakan fokus utama dalam partisipasi suatu pemilu. Perilaku pemilih merupakan suatu tindakan yang terlibat secara langsung aktif dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu baik individu atau kelompok tertentu. Pemilihan umum di negara Indonesia telah melaksanakan serentak untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah.

Pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Barru. Kontestasi politik tersebut memenangkan pasangan Andi Idris Syukur-Suardi Saleh sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Periode 2015-2020 yang diusung oleh koalisi partai pendukung PPP, PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Pasangan tersebut mengungguli dua pasangan calon lainnya yaitu Malkan Amin - Andi Salahuddin Rum yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PAN, serta pasangan Andi Anwar Aksa dan Adhan Arman yang diusung oleh PDIP dan Partai Golkar.

Berdasarkan data rekapitulasi suara KPU Kabupaten Barru, dinyatakan bahwa pasangan calon Bupati Kabupaten Barru nomor urut 3, Andi Idris Syukur-Suardi Saleh memenangkan pemilu dengan jumlah 38725 Suara (38,26%). Kemudian disusul peringkat kedua oleh pasangan calon Malkan Amin-A. Salahuddin Rum dengan jumlah 37907 Suara (37,45%), serta peringkat ketiga adalah pasangan calon Andi

Anwar Aksa-Adhan Arman dengan jumlah 24584 Suara (24,29%).¹

Terpilihnya pasangan Andi Idris Syukur – Suardi sebagai Bupati Kabupaten Barru menarik untuk dianalisis karena pada saat itu calon Bupati Andi Idrisi Syukur berstatus tersangka kasus korupsi saat pemilihan dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa status tersangka Andi Idris Syukur yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Suardi tidak menyurutkan niat mayoritas masyarakat Kabupaten Barru untuk memilihnya sebagai Bupati Kabupaten Barru.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan Bupati Kabupaten Barru pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Barru”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas fokus permasalahan penelitian ini adalah mengapa masyarakat memilih Andi Idris Syukur sebagai bupati Barru yang berstatus tersangka?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa perilaku memilih masyarakat terhadap pasangan calon Andi Idris Syukur-Suardi Saleh pada kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Barru tahun 2015.

¹ KPU 2015. <https://pilkada2015.kpu.go.id/barrukab/>. Diakses pada 2 Maret 2021 pukul 15.30 WITA

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat Mengembangkan Ilmu Politik dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Politik khusus-nya kajian tentang perilaku memilih masyarakat dalam proses pemilihan umum, khususnya pemilihan umum kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara nyata dengan memberikan informasi terkait pendidikan politik masyarakat dalam proses menetapkan pilihan terhadap kandidat dalam proses pemilihan umum, khususnya pemilihan umum kepala daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diterangkan mengenai dasar teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut disajikan dalam 5 (lima) unsur yaitu (a) Perilaku Memilih (Voting Behavior); (b) Pendekatan Perilaku Memilih; (c) Model Perilaku Politik; (d) Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Nepotisme; dan (e) Kerangka Pemikiran. Kelima poin tersebut diterangkan lebih lanjut di bawah ini.

2.1 Perilaku Memilih (Voting Behavior)

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.² Definisi tersebut menjelaskan bahwa perilaku dari setiap individu sangatlah unik, karena terjadi perbedaan dalam menentukan setiap tindakannya. Dalam menentukan perilakunya, individu melibatkan beberapa hal yang diantaranya; kognitif seperti; persepsi, perhatian, motivasi, minat, dan psikomotorik atau anggota tubuh seperti; otak, tangan, kaki, telinga, mata, dst. Kemudian, merujuk pada pernyataan Jack Plano (1985), perilaku memilih merupakan suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan itu.³

Konteks dengan dunia politik, perilaku yang dikategorikan sebagai interaksi yang terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya

² Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. PT.Grasindo. Jakarta. Hal 132

³ Plano, Jack C. Dkk, 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

merupakan sebuah bentuk konsep yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara aktif maupun secara pasif. Konsep perilaku tersebut bisa berupa partisipasi politik. Lebih jauh lagi bahwasanya konsep perilaku turut serta berpartisipasi politik merupakan sebuah hubungan timbal balik yang dilakukan pemerintah dengan masyarakatnya. Perilaku tersebut bisa bersifat pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.⁴

Kaitannya dengan definisi tersebut bahwasanya dalam hal memilih individu setidaknya akan melibatkan 2 hal, diantaranya; pikiran dan perasaan. Pertama, Proses penerimaan informasi, pemahaman terhadap informasi, dan penyikapan atau respon terhadap sebuah informasi merupakan sebuah hal pikiran yang ditunjukkan individu dalam memutuskan sebuah pilihannya.

Dalam hal ini memilih juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas informasi atau objek pilihannya, artinya seberapa jauh informasi atau objek pilihan mempengaruhi pikiran individu tersebut untuk menentukan pilihannya (misalnya; seberapa penting dan atau menguntungkan pilihan tersebut), serta intensitas informasi, artinya seberapa lama informasi tersebut berada dibenak pikiran individu. Kedua, adalah perasaan, artinya proses memilih ini berhubungan dengan kecocokan atau ketidak

⁴ Surbakti, Ramlan. 2010. *Op. Cit.* Hal. 120

cocokan terhadap objek pilihannya. Perasaan ini bisa berubah-ubah setiap waktu, tergantung mood seseorang. saat dimana kondisi seseorang sedang baik (seperti; bahagia, ceria, senang, suka, dll) maka baik pula pilihannya, begitu pula sebaliknya. Jika seseorang pada kondisi badmood (seperti; marah, benci, sedih, dll), maka buruk pula pilihannya. Perilaku Memilih Secara sederhana bisa didefinisikan sebagai keputusan seorang pemilih dalam memberikan suara kepada kandidat atau partai tertentu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif.⁵

Definisi diatas menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai Negara demokrasi setiap lima tahun sekali selalu melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah ini dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi politik. Partisipasi ini secara singkatnya bisa berupa pengambilan peran atau ikut menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpinnya dimasa mendatang. Pemimpin yang menempati posisi sebagai wakil rakyat baik ditingkatan eksekutif maupun legislatif tersebut merupakan sebuah bentuk manifestasi atau perwujudan dari masyarakat dengan cara melaksanakan agenda politik yang diselenggarakan pemerintah (Voting Behaviour).⁶

Konteks dengan Indonesia, menurut Pamungkas (2010), bahwa budaya politik pemilih di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Adanya budaya politik idealis yang melihat pemilu sebagai sarana memperjuangkan idealisme dan garis ideologi.
2. Budaya politik pemilih protes, orang kebanyakan menyebutnya sebagai pemilih yang pragmatis dikarenakan pemilih ini ikut pemilu

⁵ Yaqin, A. (2014). *Perilaku Golput Terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2014: Studi Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Skripsi. Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Hal. 13

⁶ Ibid

karena ingin mendapatkan sebuah kompensasi atau memasang tarif tertentu atas suara yang mereka inginkan.

3. Budaya politik kompromistik. Pemilih jenis kompromistik ini menganggap bahwa pemberian suara merupakan kewajiban terhadap negara dan secara bersamaan apabila diberikan kompensasi material menganggap bahwa itu tidak jadi persoalan.

Penjelasan lain mengenai perilaku memilih adalah sebagai suatu aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilihan umum. Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters dengan sendirinya akan menentukan pilihannya kepada kandidat tertentu.⁷

Penggunaan hak pilih ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek jujur dan luber. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.⁸

2.2 Pendekatan Perilaku Memilih

Penjelasan teoritis tentang voting behavior didasarkan pada dua model atau pendekatan, yaitu model/pendekatan sosiologi dan model/pendekatan psikologi. Di lingkungan ilmuwan sosial Amerika Serikat, model pertama disebut sebagai mazhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior), sementara model kedua disebut sebagai

⁷ Surbakti, Ramlan. 2010. *Op. Cit.* Hal 186

⁸ Yaqin, A. (2014). *Op. Cit.* Hal 14

mazhab Michigan (The Michigan Survey Research Centre). Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor- faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, sementara mazhab kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya.⁹ Dari dua mazhab tersebut, ada mazhab ketiga yang itu sangat berpengaruh dalam perilaku memilih, yaitu mazhab dimana perilaku memilih lebih menekankan pada faktor-faktor rasionalitas.

2.2.1 Pendekatan Sosiologis

Secara garis besar dalam memahami lebih jauh tentang fenomena perilaku memilih (voting behavior) maka ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam menelusuri lebih jauh tentang perilaku memilih dengan pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia). Pendekatan ini biasa juga disebut sebagai pendekatan sosial struktural untuk menerangkan perilaku pemilu secara logis dan awalnya dikembangkan oleh mazhab Columbia dan selalu dikaitkan dengan Paul F. Lazarsfeld, yaitu The Columbia School of Electoral Behavior. Lazarsfeld (Roth, 2008: 23- 24) menjelaskan bahwa setiap orang pemilih hidup dan memiliki karakteristik sosial tertentu seperti: status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaannya, usianya, akan mendefinisikan bahwa lingkaran sosial yang akan mempengaruhi perilaku dan keputusan memilih seseorang karena setiap individu memiliki lingkaran sosial yang mempunyai norma tersendiri, dan

⁹ KPUD Bondowoso dan Lembaga Penelitian Universitas Jember. 2015. *Laporan Penelitian Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Bondowoso*. Hal. 5

aturan yang mengatur hidup komunitas mereka. Maka, kontrol atas perilaku individu dengan cara memberikan tekanan maka individu akan menyesuaikan diri tanpa harus bersitegang dengan lingkaran sosialnya.¹⁰

Karakteristik sosial yang dimasukkan adalah seperti, pekerjaan, pendidikan, agama, umur, jenis kelamin, wilayah dan lainnya. Ini dianggap mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi, ataupun kelompokkelompok okupasi dan sebagainya. Maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, maupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan suatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.¹¹

Gerald Pomper memerinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi voting behavior ke dalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial-ekonomi ini bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis, dan sebagainya.¹² Pendek kata,

¹⁰ Febriani, E. (2018). *Analisis Perilaku Memilih (Voting Behavior) Pemilih Pemula Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019*. Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional, 4(1), 43-58.

¹¹ Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.

¹² Darden, J. T. 1977. Gerald Pomper, Voter's Choice: Varieties of American Electoral Behavior (Book Review). *International Journal of Comparative Sociology*, 18, 302., hal. 195-208. Dalam KPUD Bondowoso

ikatan-ikatan sosiologis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih cukup signifikan untuk melihat perilaku memilih.¹³

2.2.2 Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis sering disebut sebagai pendekatan Michigan (The Michigan Survey Research Center). Pendekatan ini menempatkan individu sebagai pusat perhatian (Roth, 2008 dalam Febriani, 2018). Persepsi dan penilaian pribadi terhadap sang kandidat atau partai politik dan temama yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat berpengaruh atas pilihan politiknya pada pemilu . Selain itu juga ditegaskan bahwa 'keanggotaan psikologis' dalam partai yang dapat diukur dengan dalam bentuk variabel identifikasi partai turut mempengaruhi pilihan politik atau perilaku memilih (pengaruh jangka panjang). Maka, dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan ini, variabel jangka pendek dan variabel jangka panjang berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Keputusan individu secara primer tidak ditentukan secara sosial struktural.¹⁴

Pendekatan sosial psikologis berusaha dijelaskan melalui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu dalam jangka waktu pendek. Hal ini dijelaskan melalui trias determinan yaitu: (1) Identifikasi partai, identifikasi partai dijadikan sebagai variabel untuk mengukur jumlah faktor-faktor predisposisi (pengalaman pribadi atau orientasi politik) yang relevan bagi seorang individu (2) Orientasi kandidat, serta (3) Orientasi isu atau tema. Jika faktor-faktor tersebut diumpamakan sebagai suatu aliran yang dituangkan pada sebuah corong maka pengindentifikasian partai juga

dan Lembaga Penelitian Universitas Jember. 2015. Laporan Penelitian Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Bondowoso. Hal. 7

¹³ Mark N. Franklin, "Voting Behavior", dalam Seymour Martin Lipset, *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995), hal. 1346-1353. Dalam KPU Bondowoso dan Lembaga Penelitian Universitas Jember. 2015. *Op. cit.* Hal. 7

¹⁴ Febriani, E. (2018). *Op. cit.* Hal 6

bisa disebut sebagai penyaringan dalam keanggotaan psikologis. Roth menyebutkan bahwa seorang individu tidak selalu seiring dan dikaitkan dengan keanggotaan formil pada sebuah partai karenanya keanggotaan partai secara psikologis juga disebut dengan orientasi partai yang afektif. Campbell mengatakan bahwa identifikasi partai seringkali diwariskan orang tua kepada anaknya seiring dengan penambahan usia.¹⁵

Identifikasi partai (Party Identification) merupakan orientasi yang permanen, yang tidak berubah dari pemilu ke pemilu kecuali seseorang mengalami perubahan pribadi yang besar (menikah, pindah profesi, tempat tinggal dan situasi politik yang sangat luar biasa (krisis ekonomi dan perang) maka identifikasi partai bisa saja berubah. Pendekatan psikologis ini juga membedakan antara kekuatan, arah, intensitas orientasi, baik itu orientasi isu maupun orientasi kandidat. Perilaku memilih individu dapat diubah dengan tema-tema khusus apabila memenuhi tiga persyaratan. Pertama, tema tersebut dapat ditangkap oleh pemilih. Kedua, tema tersebut dianggap penting oleh pemilih. Ketiga, harus mampu menggolongkan dirinya baik positif maupun negatif (Roth, 2008: 37). Inti dari pendekatan ini adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku memilih.¹⁶ Mujani, dkk. (2012) berpendapat bahwa faktor-faktor psikologis, terutama kepemimpinan dan identifikasi partai memiliki pengaruh yang signifikan dibanding faktor-faktor sosiologis, baik agama, suku bangsa maupun kelas.¹⁷

¹⁵ Ibid, Hal 7

¹⁶ Ibid

¹⁷ Mujani, Saiful. William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika.

Munculnya pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap--secara metodologis-- sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Apalagi, pendekatan sosiologi umumnya hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok tertentu pada suatu partai politik, tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih/mendukung suatu partai politik tertentu sementara yang lain tidak.¹⁸

Di samping itu, secara materi, patut dipersoalkan apakah benar variabel- variabel sosiologis seperti status sosial-ekonomi keluarga, kelompok-kelompok primer ataupun sekunder, itu yang memberi urunan pada perilaku memilih. Tidakkah variabel-variabel itu dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang, bukan karakteristik sosiologis.¹⁹

2.3 Pendekatan Pilihan Rasional

Dua pendekatan terdahulu secara implisit atau eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang kosong. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas kecuali atas keinginan dalang. Pemilih seakan pion- pion catur yang dengan mudah dapat ditebak langkah- langkahnya. Mereka beranggapan bahwa perilaku memilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latarbelakang keluarga, pembelahan kultural, afiliasi- afiliasi okupasi,

¹⁸ Richard G. Niemi and Herbert F. Weisberg, *Controversies of Voting Behavior*, (Washington D.C.: a Division of Congressional quarterly Inc., 1984), hal. 9-12. Dalam KPUD Bondowoso dan Lembaga Penelitian Universitas Jember. 2015. *Op. cit.* Hal. 9

¹⁹ Ibid

ataupun identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel- variabel yang secara sendiri-sendiri atau komplementer mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Pemilih seakan- akan berada pada waktu dan ruang yang kosong, yang keberadaan dan ruang geraknya ditentukan oleh posisi individu dalam lapisan sosialnya.²⁰

Antony Downs merupakan orang yang pertama memperkenalkan teori ini, melalui teori ekonominya dan demokrasi, sekaligus orang yang paling konsekuen mengambil jarak dari dasar penjelasan yang telah dicetuskan oleh mazhab Colombia (pendekatan sosiologis) dan mazhab Michigan (pendekatan psikologis). Menurut Downs, pemilih yang rasional adalah hanya menuruti kepentingannya sendiri atau walaupun tidak akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan orang lain (egois). Alasan individu mengharuskan mereka bertindak egois ini disebabkan karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan akan harta benda mereka. Jika ini diterapkan dalam perilaku pemilih, maka pemilih akan memilih kandidat atau partai tertentu dengan pertimbangan bahwa lebih menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Pemilih ini mengabaikan konsep politis sebuah partai dan kandidat tapi lebih memperhitungkan keuntungan terbesar jika partai atau kandidat tersebut menduduki sebuah jabatan publik. Pemilih harus memiliki informasi mengenai kegiatan partai atau kandidat mengenai kegiatan partai masa lalu dan setidaknya mengetahui apa yang akan dilakukan di masa mendatang.²¹

Sejalan dengan pendekatan ini pilihan rasional memusatkan perhatian pada perhitungan biaya dan manfaat (cost-benefit). Menurut pendekatan rational choice, yang menentukan dalam menentukan pilihan

²⁰ KPUD Bondowoso dan Lembaga Penelitian Universitas Jember. 2015. *Op. cit.* Hal. 11

²¹ Febriani, E. (2018). *Op. cit.* Hal 8

memilih adalah bukanlah ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural (Colombia) atau ikatan partai yang kuat (identifikasi partai/Michigan). Namun, hasil dari proses penilaian rasional dari individu yang cakap. Hal yang lain dijelaskan oleh Elster dalam Mars & Stocker bahwa sebenarnya inti sari dari pilihan rasional (rational choice) adalah ketika dihadapkan beberapa jenis tindakan, orang biasanya melakukan apa yang mereka anggap dan yakini sekaligus mempunyai kemungkinan hasil yang terbaik dari pilihan tersebut. Sedangkan Mars dan Stoker mengatakan bahwa pilihan rasional adalah bagian dari perangkat yang sangat diperlukan oleh pakar ilmu politik, karena fenomena penting yang sebagian bisa dijelaskan dengan teori. Tetapi tidak mengklaim bahwa pendekatan pilihan rasional itu berdiri sendiri. Almond (1990) mempertegas bahwa ia butuh perspektif lain untuk membantu menjelaskan mengapa individu mempunyai kepentingan, bagaimana mereka melihat kepentingan tersebut, kekuasaan, serta peran sosial yang menentukan batas-batas sosial tindakan mereka.²²

2.4 Model Perilaku Politik

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Agregasi politik ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa, sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelis, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik sering kali dijelaskan dari sudut psikologi di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model

²² Ibid, Hal 9

tentang faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan tersebut. Menurut model ini, terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik.²³

Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung.²⁴

Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian, perlu dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Artinya, penilaian terhadap suatu objek tersebut. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan aggressor. Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika

²³ Surbakti, Ramlan. 2010. *Op. Cit.* Hal. 110

²⁴ *Ibid*, Hal. 111

hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.²⁵

Faktor lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa sosialisasi, internalisais, dan politisasi akan mempengaruhi secara langsung salah satu dari kedua faktor yang mencakup struktur kepribadian atau sikapnya terhadap objek kegiatan itu, dan situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan. Hubungan kedua faktor ini terhadap perilaku akan bersifat zero sum: apabila faktor sikap yang menonjol, faktor situasi kurang mengedepan, sebaliknya apabila situasi mengedepan, faktor sikap kurang menonjol.²⁶

2.5 Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu sebagai sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.²⁷

Menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.²⁸ Sebagai suatu bentuk

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid, Hal. 112

²⁷ Miriam Budiarjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.461.

²⁸ Surbakti, Ramlan. 2010. *Opt. Cit.*, hlm.15

implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Joko J. Prihantoro (2005) menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh- tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan

²⁹ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.³⁰

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³¹

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat

³⁰ Adhani, H. (2009). *Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Tesis. Universitas Indonesia. Hal, 17

³¹ Ibid, Hal 18

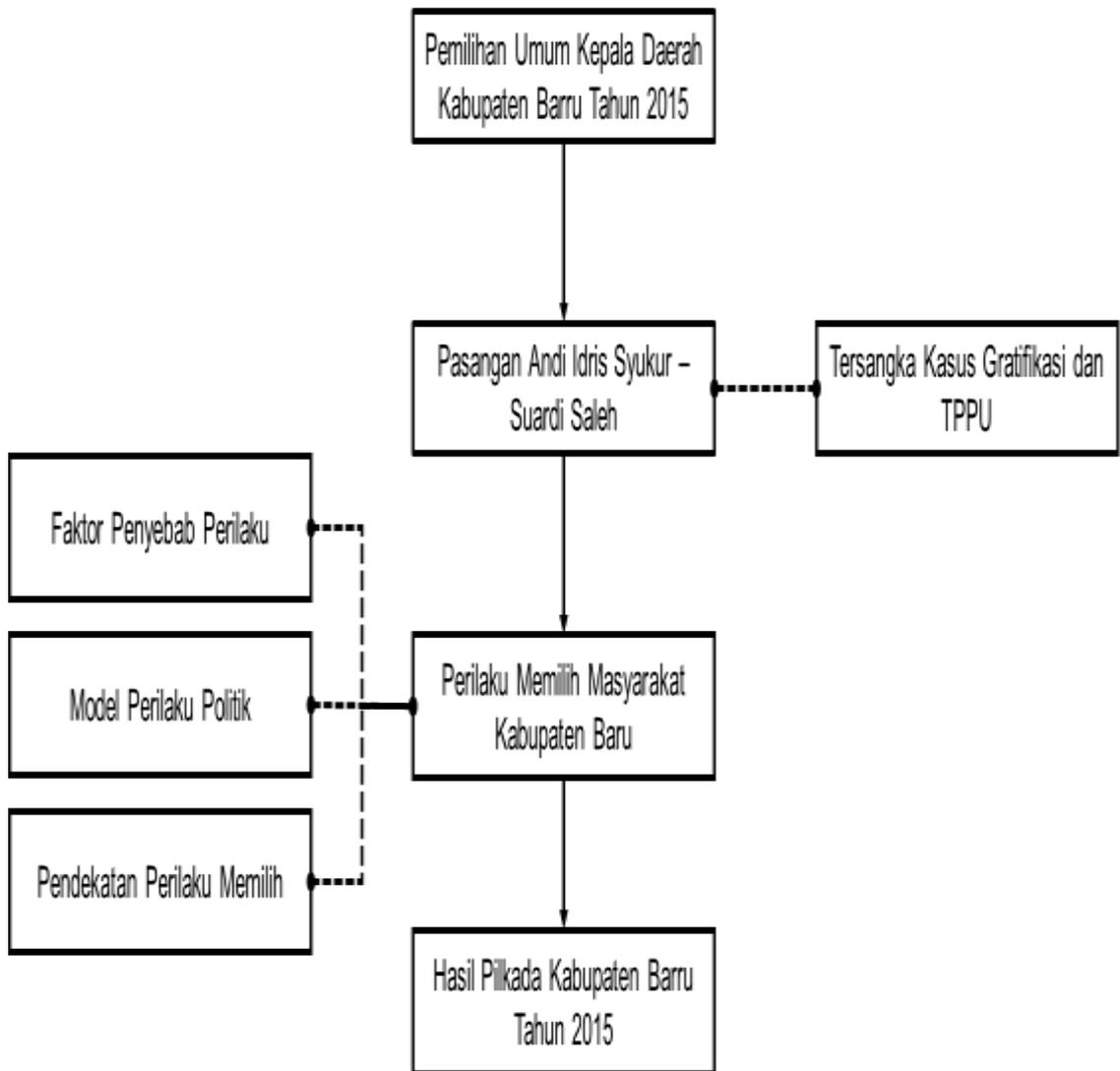
terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.

2.6 Kerangka Pemikiran

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru pada tahun 2015 menjadi salah satu kontestasi pesta demokrasi politik daerah yang menuai perhatian publik. Hal itu disebabkan oleh banyaknya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada. Isu yang paling menarik perhatian publik adalah kasus yang menjerat calon petahana Andi Idris Syukur. Berdasarkan pengertian perilaku memilih yang dijelaskan di atas bahwa masyarakat dalam menentukan pilihannya mempunyai faktor dan pendekatan tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi pendekatan dan faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Andi Idris Syukur-Suardi Saleh. Pasangan calon ini menarik ditelusuri faktor kemenangannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Periode 2016-2021 karena pada saat penetapannya sebagai Bupati, Andi Idris Syukur telah ditetapkan sebagai tersangkakan kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Persepsi dan faktor penentu yang membuat masyarakat tetap memilih pasangan calon yang terjerat kasus korupsi merupakan sesuatu yang menarik ditambah lagi bahwa adanya dugaan pelanggaran sistematis dari calon tersebut karena merupakan kandidat petahana. Perilaku memilih masyarakat merupakan pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengikut sertakan bagaimana tipologi pendekatan dalam konsepsi perilaku politik masyarakat.

2.7 Skema Pemikiran



Gambar 1. Skema Pemikiran